

Performativity Power Relations: A Discourse Analysis of Regent Sudewo's Policies via the Instagram Account @wargapati_

Performativitas Relasi Kuasa: Analisis Wacana Kebijakan Bupati Sudewo Melalui Akun Instagram @wargapati_

Lalu Didik Apriawan*

¹Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana

Email: lalu.apriawan@staf.undana.ac.id

Abstract

This study examines the performativity of power relations within the social movement of Pati citizens through a critical discourse analysis of content posted on the Instagram account @wargapati_, in response to the policies of Regent Sudewo. Employing Norman Fairclough's critical discourse analysis framework, the research investigates how textual, discursive, and social practices intersect to construct citizen representation, digital resistance, and the articulation of collective identity among the people of Pati. The data analyzed in this study consist of visual posts, captions, and digital interactions collected during the pivotal period of the social movement on August 13, 2025. The findings reveal that @wargapati_ serves not only as a space for free expression but also as a performative arena where citizens negotiate their position in relation to the local government of Pati Regency. Through visual, narrative, and affective strategies, the account reflects tensions between governmental policies and citizen aspirations, while simultaneously fostering a form of digital solidarity that is both disruptive and transformative. This research underscores the significance of social media—particularly Instagram—as a site of political articulation for Pati citizens and advocates for more participatory approaches in understanding the dynamics of power relations and resistance in the digital age

Keywords: Social Movement, Power Relations, Discourse and Digital

Abstrak

Penelitian ini mengkaji performativitas relasi kuasa dalam gerakan sosial masyarakat Pati melalui analisis wacana kritis terhadap konten akun Instagram @wargapati_ yang merespons kebijakan Bupati Sudewo. Dengan menggunakan kerangka pendekatan penelitian analisis wacana kritis dari Norman Fairclough, penelitian ini menganalisis bagaimana praktik tekstual, praktik diskursif dan praktik sosial saling berkelindan dalam membentuk representasi warga, resistensi digital dan artikulasi identitas kolektif Masyarakat Pati. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini berupa unggahan visual, caption dan interaksi digital selama periode krusial gerakan sosial pada 13 Agustus 2025. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa akun instagram @wargapati_ tidak hanya menjadi ruang kebebasan berekspresi, akan tetapi menjadi arena performative, di mana para warga Pati berusaha menegosiasikan posisi mereka terhadap kekuasaan lokal Pemerintahan Kabupaten Pati. Merujuk kepada strategi visual, naratif dan afektif dalam akun @wargapati_ telah berupaya merepresentasikan ketegangan antara kebijakan pemerintah Kabupaten Pati dan aspirasi warga Pati, sekaligus telah membentuk solidaritas digital dalam aksi Gerakan Sosial yang bersifat disruptif dan transformatif.

Kata Kunci: Gerakan Sosial, Relasi Kuasa, Wacana dan Digital

Terbit pada
Volume 09
Edisi 02
November
2025

Submisi :
12 November
2025

Revisi :
22 November
2025

Publikasi :
30 November
2025

Lisensi:
Hak Cipta (c)
Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu
Politik 2025



This work is
licensed under
a [Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

PENDAHULUAN

Gerakan sosial merupakan bentuk aksi kolektif yang tumbuh dari akar rumput dan telah menjadi bagian integral dalam mendorong perubahan social (Lo Piccolo 2025). Di Indonesia, mobilisasi masyarakat sipil yang bersifat lokal sering kali berkembang menjadi gerakan nasional, terutama ketika didukung oleh penyebaran informasi melalui media digital. Salah satu contoh nyata terjadi di Kabupaten Pati, di mana masyarakat mengorganisasi aksi langsung sebagai bentuk gugatan terhadap kekuasaan dari bawah ke atas. Gerakan ini telah mengusung prinsip non-hierarki, otonomi dan demokrasi partisipatif, serta mencerminkan wujud aktivisme yang melibatkan mobilisasi massa dan inisiatif gotong royong sebagai cirikhas bangsa Indonesia (Sujito 2025). Pemicu utama gerakan sosial yang terjadi di Kabupaten Pati pada tanggal 13 Agustus 2025 diantaranya yaitu tekanan fiskal yang semakin berat, disorientasi ekonomi-politik rezim, manipulasi teknokrasi dalam kebijakan serta kegagalan kooptasi dan fragmentasi politik. Selain itu, adanya ketidakadilan yang dirasakan masyarakat akibat kebijakan sepihak pemerintah setempat, terakit isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250% (Sujito 2025). Kebijakan ini memicu resistensi kolektif yang bersifat kontra-hegemonik dengan menghadirkan massa sebanyak lebih dari 100.000 orang (Indriawati 2025b, 2025a) sebagai upaya masyarakat dalam melawan *status quo* dan menuntut perubahan kebijakan dari pihak penguasa. Gerakan ini, tidak hanya mengekspresikan ketidakpuasan atas penerapan kebijakan, tetapi gerakan ini juga telah membentuk ruang politik baru yang memungkinkan para warga menjadi aktor aktif dalam proses demokrasi di Indonesia.

Kebijakan sepihak menurut Masyarakat Pati terkait kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bermula dari kondisi fiskal atau kondisi keuangan daerah yang sangat bergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat (Candra 2025; Maggara et al. 2024; Simanjuntak 2025). Pemangkasan sumber anggaran memaksa pemerintah daerah untuk mencari strategi alternatif, salah satunya melalui peningkatan pajak lokal (Estherina 2025; Yuliana and Prasetyo 2022). Dalam konteks ini, otoritas lokal menghadapi dilema dalam menentukan prioritas layanan publik, sebagaimana dijelaskan oleh Rod Hick (2022) yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah sering kali terpaksa membuat pilihan sulit dalam sebuah situasi dimana anggaran terbatas. Fenomena tersebut tidak terlepas dari stagnasi pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah dan dampak globalisasi keuangan yang mempersempit ruang fiskal pemerintah lokal (Hick 2022). Pajak konsumsi seperti PBB pun menjadi instrumen penting untuk membiayai pengeluaran kesejahteraan masyarakat (Darmawan 2024; Purwanti 2025). PBB-P2 atau Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi satu jenis pajak daerah yang berfungsi sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan memiliki peran penting dalam mendanai program pembangunan (Darmawan 2024). Oleh karena itu, pejabat lokal seperti Bupati Kabupaten yaitu Bapak Sudewo memiliki kendali atas kebijakan perpajakan, termasuk keputusan untuk menaikkan pajak lokal yaitu tarif PBB sebesar 250% sebagai respons terhadap tekanan fiskal dari pusat (Adni 2025; antaranews.com 2025).

Fenomena tersebut memberikan Gambaran bahwa Pemerintah Daerah tidak lagi dipandang sebagai entitas tunggal yang netral, melainkan sebagai kumpulan aktor politik dengan beragam kepentingan (Takagi 2025). Akibat tindakan kontroversial yang dilakukan oleh Bupati Sudewo memicu aksi gerakan sosial masyarakat Pati atau dalam salah satu informasi membentuk Gerakan Pati Bersatu (Santosa 2025). Gerakan sosial tersebut kemudian berkembang menjadi aksi protes terbuka terhadap kepemimpinan Bupati Sudewo yang dianggap masyarakat sangat arogan dalam pernyataannya yang menyatakan bahwa “*siap menghadapi 50.000 demonstran*”, pernyataan tersebut memicu aksi dan protes serta tantangan bagi Masyarakat Pati (antaranews.com 2025). Fenomena sosial tersebut, telah mencerminkan bentuk oposisi terhadap tantangan kekuasaan yang dilakukan melalui aksi mobilisasi massa secara masif. Merujuk pada kajian Künkler (2025), sejarah gerakan sosial di Indonesia menunjukkan bahwa aksi *bottom-up* memiliki potensi untuk membuka ruang negosiasi dengan elit politik. Salah satu contoh kasus yaitu mengenai aksi demonstrasi terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto (Indirawati 2025). Kasus tersebut terdapat dalam literatur berjudul “*Activists in Transition: Progressive Politics in Democratic Indonesia*” oleh Thushara Dibley & Michele Ford pada tahun 2019 yang diterbitkan oleh Cornell University Press. Dalam literatur tersebut menjelaskan bahwa aksi *bottom-up* berasal dari masyarakat sipil dan bukan dari para elite politik (Dibley and Ford 2019). Gerakan sosial semacam ini tidak bertujuan untuk merebut jabatan politik, melainkan menuntut konsesi, perubahan kebijakan dan akuntabilitas dari sang penguasa.

Aksi kolektif Masyarakat Pati terhadap penolakan kenaikan PBB pada awalnya hanya berlangsung di ranah daring atau virtual melalui kritik konstruktif dan ekspresi ketidakpuasan terhadap sosok kepemimpinan Bupati Sudewo melalui konten-konten berupa poster digital, *caption* media sosial hingga video perlawanan yang mengkritik gaya dan sikap Sudewo yang dianggap sangat arogan. Konten-konten tersebut menyebar luas di Instagram, TikTok, Facebook dan YouTube sehingga menjadi pemantik solidaritas daring yang kemudian bertransformasi menjadi aksi nyata secara luring (Santosa 2025). Peralihan dari ruang digital ke ruang fisik menunjukkan dinamika gerakan sosial yang adaptif dan responsif terhadap wacana kekuasaan. Hal tersebut bertujuan untuk memobilisasi sumber daya dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Gerakan sosial ini dapat bersifat partisan maupun non-partisan tergantung pada agenda, serta aktor intelektual yang memantau dan mengawal agenda perubahan. Dengan demikian, gerakan sosial tidak terlepas dari peran Internet sebagai media mobilisasi dan partisipasi politik para masyarakat.

Teknologi informasi kini telah menciptakan ruang publik virtual yang dinamis dan interaktif (Gazali 2014). Internet memungkinkan warga Pati dan warga Indonesia lainnya untuk mengakses informasi, mengorganisasi aksi dan memotivasi partisipasi dalam isu-isu kebijakan dan kekuasaan Pemerintahan. Dengan adanya platform media sosial telah memberikan sarana perlintasan batas antara ruang privat dan publik, serta menjadi alat efektif dalam menambah massa aksi secara luring (Zhu 2017). Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran platform media daring yaitu Instagram pada akun @wargapati_ yang memiliki pengikut sebanyak 21.000 dan mengikuti 521 akun serta terdapat 398 postingan. Akun @wargapati_ ini sudah bertanda centang biru

yang artinya merupakan sebuah tanda verifikasi resmi yang diberikan oleh pihak Instagram kepada akun yang dianggap asli, otentik dan mewakili figur publik, *brand* atau suatu entitas penting dalam ruang virtual (Imami 2025). Akun Instagram @wargapati telah menjadi wujud aktivisme sipil dalam membentuk wacana gerakan sosial masyarakat Pati pada aksi kolektif demonstrasi tanggal 13 Agustus 2025 yang menjadi suatu arena performativitas relasi kuasa antara pemerintah Kabupaten Pati dan warga atau Masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan ruang publik virtual yang dinamis dan interaktif, di mana media sosial menjadi arena baru bagi warga untuk mengakses informasi, mengorganisasi aksi dan memobilisasi partisipasi politik. Dalam konteks Kabupaten Pati, fenomena gerakan sosial yang muncul melalui akun Instagram @wargapati_ memperlihatkan bagaimana ruang digital dapat menjadi medium artikulasi politik warga akar rumput. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran platform media daring, khususnya Instagram, dalam membentuk wacana gerakan sosial masyarakat Pati. Selain itu, bukan berfokus pada aspek teknis akun, melainkan pada bagaimana narasi, interaksi dan mobilisasi massa melalui media sosial dapat berkontribusi terhadap aksi kolektif di ruang publik. Selanjutnya, studi ini menekankan pada minimnya kajian yang menghubungkan gerakan sosial lokal dengan praktik komunikasi digital berbasis media sosial di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya menekankan gerakan sosial dalam konteks fisik atau politik formal, sementara dimensi virtual, seperti bagaimana akun terverifikasi dengan ribuan pengikut dapat menjadi arena negosiasi sang pemilik kuasa antara masyarakat dan pemerintah yang masih jarang ditelaah secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk memperlihatkan bagaimana media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi menjadi ruang politik baru yang memperkuat demokrasi partisipatif dan memperluas jangkauan gerakan sosial dari lokal menuju skala nasional.

METODE PENELITIAN

Kajian Teori

Penelitian ini mengacu pada teori wacana dari Michel Foucault untuk menggali performativitas relasi kuasa antara pemerintahan Kabupaten Pati dengan Warga Pati yang terjadi pada tanggal 13 Agustus 2025 dengan menekankan pada wacana Gerakan Sosial dalam akun Instagram @wargapati_. Merujuk karya Foucault yang berjudul "*The Subject and Power*," menjelaskan bahwa sejarah ekonomi menyediakan instrumen yang baik untuk mempelajari hubungan produksi berupa kekuasaan (Means 2022). Dengan demikian, Foucault menggunakan model struktural yang disediakan oleh Marxisme dan Saussureanisme sebagai analogi untuk kekuasaan, dengan konsekuensi yang menekankan struktur dan mengorbankan agensi (Avelino 2021). Wacana didefinisikan sebagai ansambel ide, konsep dan kategori yang diproduksi dan direproduksi melalui serangkaian praktik yang dapat diidentifikasi maknanya (Hajer and Versteeg 2005). Teori wacana ini dapat ditempatkan dalam tradisi interpretatif atau konstruksionis sosial dalam ilmu-ilmu sosial. Dalam penelitian wacana Gerakan Sosial

Masyarakat Pati pada kebijakan Bupati Sudewo, bukan dititik beratkan pada sebuah fenomena kebijakan itu sendiri yang penting, namun pada cara bagaimana masyarakat memahami fenomena ini, dengan begitu teori wacana digunakan sebagai pisau analisis untuk melacak perebutan kekuasaan diskursif yang mendasari kebijakan politik tersebut. Selain itu, teori wacana ini digunakan sebagai alat untuk menganalisis kebijakan menjadi situs politik budaya, yang mengarahkan orang atau subjek untuk merenungkan siapa mereka dan apa yang mereka inginkan dalam konteks Masyarakat Pati pada momen Demonstrasi 13 Agustus 2025. Teori wacana menjadi alat untuk menggali pemerintahan yang menjadi sebuah fenomena konstruksi diskursif dalam arena pertarungan masalah kebijakan Bupati Sudewo yang mana, wacana telah berubah dari waktu ke waktu dan bagaimana hal ini dapat membentuk subjektivitas histori yang mengacu pada proses Sejarah Gerakan Sosial pada Masyarakat di Indonesia.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis dari Norman Fairclough (1995). Pendekatan penelitian ini menggali analisis wacana kritis terhadap pemeriksaan hubungan antara teks, praktik wacana dan praktik sosiokultural dalam konteks wacana Gerakan sosial Masyarakat Pati pada akun Instagram @wargapati_. Dalam pendekatan teks ini dapat disajikan dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. Sementara, praktik wacana mencakup proses produksi teks oleh para profesional seperti media, selain itu untuk konsumsi teks oleh para khalayak atau masyarakat. Selanjutnya, untuk praktik sosiokultural mencakup kegiatan sosial dan budaya termasuk dominasi domain politik, ideologis dan praktik situasional, kelembagaan dan kemasyarakatan suatu masyarakat di sekitar peristiwa komunikatif dalam konteks penelitian ini adalah fenomena aksi kolektif pada tanggal 13 Agustus 2025 di Kabupaten Pati. Menurut Norman Fairclough, kekuasaan berakar dalam bahasa dan konstruksi identitas, sehingga perlu dikaji secara kritis untuk mengungkap ketidaksetaraan dan ideologi. Representasi ideologis sering kali tidak muncul secara eksplisit, melainkan tertanam dalam teks dan penggunaan bahasa sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis dengan tiga komponen utama:

1. Analisis tekstual yaitu mendeskripsikan sifat linguistik teks, termasuk kosakata, struktur kalimat dan gaya bahasa.
2. Analisis praktik diskursif yaitu menafsirkan hubungan antara teks, proses produksinya, serta distribusi dan konsumsi oleh audiens.
3. Analisis praktik sosial yaitu menjelaskan konteks situasional, kelembagaan dan sosial yang melatarbelakangi suatu wacana.

Dalam konteks penelitian ini, bahan analisis tidak hanya berupa dokumen kebijakan dan pemberitaan media, tetapi berupa unggahan (398 postingan) dan interaksi komentar dari pengikut akun Instagram @wargapati_. Data digital tersebut menjadi penting karena memperlihatkan bagaimana bahasa, simbol dan narasi

digunakan untuk membangun solidaritas, memobilisasi massa, serta menegosiasikan posisi masyarakat Pati terhadap kebijakan pemerintah pada rentang waktu bulan Juli hingga bulan September. Dengan demikian, analisis wacana kritis memungkinkan peneliti menelusuri relasi kuasa yang tersembunyi di balik teks dan praktik komunikasi daring. Pendekatan tiga dimensi dari Norman Fairclough tersebut bermanfaat pada tingkat mikro dalam mengidentifikasi leksikon yang digunakan untuk mengkonstruksi identitas Gerakan sosial Masyarakat Pati pada akun Instagram @wargapati_ , selanjutnya yang terkait dengan praktik kelembagaan ada pada tingkat meso, serta praktik politik, ideologis dan budaya ada pada tingkat makro.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa laporan surat kabar, konten Instagram @wargapati_ dan dokumen berupa aturan serta laporan kebijakan Pemerintahan yang tersebar di Internet yang merupakan bagian dari data publik. Pengumpulan data dilakukan pada periode bulan Juli hingga bulan September 2025, mencakup 398 unggahan/caption dari akun Instagram @wargapati_ dan Sekitar 2.500 komentar yang relevan dengan isu gerakan social serta 12 laporan surat kabar daring yang memberitakan aksi warga Pati dan 3 dokumen kebijakan resmi dari pemerintah daerah dan kementerian terkait. Data ini menjadi bahan utama untuk analisis wacana kritis, dengan fokus pada bagaimana bahasa, narasi dan representasi digunakan untuk membentuk pemahaman publik mengenai gerakan sosial warga Pati. Merujuk pada Carvalho (2008) yang menjelaskan bahwa sebagian besar studi wacana pada media biasanya berfokus pada wacana berita dalam waktu singkat dalam mengkaji suatu kebijakan tertentu. Dengan begitu, studi ini berfokus pada representasi Warga Pati yang tersebar dalam wacana Gerakan sosial dalam pemberitaan media massa dan media sosial pada kejadian per 13 Agustus 2025.

Teknik Analisis Data

Tahapan-tahapan dalam pendekatan analisis wacana dalam penelitian ini tidak secara inheren linier, berurutan dan saling eksklusif, akan tetapi masing-masing tahapan saling terkait satu sama lain dalam wujud interaksi dinamis, yang mana mengharuskan peneliti harus melakukan analisis atau penyelidikan “bolak-balik” antara tahapan per tahapan selama proses analisis. Berikut tahapan analisis dalam pendekatan analisis wacana menurut Norman Fairclough :

1. Dimensi Teks (*Textual Analysis*) yang mana analisis dimulai dengan dimensi praktik sosial budaya dalam tahap penjelasan, yang memperhatikan peristiwa diskursif yang mendasari produksi teks. Analisis ini melingkupi situasional, kelembagaan, dan sosial untuk mendeteksi hubungan kekuasaan, ideologi, dan efek wacana (Fairclough, 1989, 1992, 1995). Peneliti mengamati situasi di mana wacana diproduksi (analisis situasional), entitas yang menghasilkan wacana (analisis institusional), dan masyarakat di mana wacana diatur (analisis sosial) dan secara berulang kali di analisis selama tahap deskripsi dan interpretasi.

2. Dimensi Praktik Diskursif (*Discourse Practice*) yaitu memahami kondisi situasional, kelembagaan dan sosial di mana teks berada, peneliti beralih ke analisis tekstual pada tahap deskripsi. Pada tahap ini, menganalisis berbagai fitur linguistik, seperti kosakata, tata bahasa dan struktur tekstual yang bersinggungan dengan kejadian Gerakan Sosial Masyarakat Pati pada Agenda Demo Pati 13 Agustus 2025. Analisis ini digunakan untuk mempertimbangkan kembali pilihan leksikal untuk melihat apakah kata-kata tertentu menyebarluaskan makna tertentu selama kejadian berlangsung. Pada tahap interpretasi ini peneliti memeriksa dimensi praktik wacana, yang memperhatikan produksi, distribusi dan konsumsi teks yang digunakan untuk melihat bagaimana teks berinteraksi dengan konteks intertekstual dan situasional (Fairclough, 1992). Setelah menemukan makna dari wacana aksi Gerakan sosial Masyarakat Pati melalui analisis tekstual pada tahap deskripsi, peneliti berfokus pada prinsip-prinsip interdiskursivitas dengan menentukan jenis wacana apa yang ada di kedua teks untuk menentukan proses produksi teks.
3. Dimensi Praktik Sosial (*Social Practice*), tahapan ini peneliti memeriksa rantai intertekstual demo Pati dengan mengungkap bagaimana teks Gerakan sosial dan aksi protes saling mempengaruhi untuk mengamati proses distribusi teks. Selanjutnya, peneliti ke tahap deskripsi untuk mengamati koherensi dengan meninjau kembali analisis tekstual dan menerapkan konteks situasional dari analisis sosial budaya pada tahap penjelasan. Langkah terakhir ini, dilakukan untuk mengekspos proses konsumsi teks (Fairclough, 1992).

HASIL PENEMUAN DAN DISKUSI

Praktik komunikasi politik, relasi kuasa sering kali ditampilkan melalui metafora yang tidak boleh dipahami secara literal. Sebagai wujud legitimasi performatif, kebijakan yang ditampilkan melalui akun Instagram @wargapati_ juga dapat dibaca sebagai ritual kuasa. Narasi kebijakan yang dipublikasikan bukan hanya sekadar informasi, melainkan pertunjukan simbolik yang menegaskan mengenai posisi pemegang kuasa dan aktor seperti masyarakat. Selain itu, mengikuti kerangka Goffman bahwa komunikasi kebijakan di media sosial merupakan panggung depan, di mana legitimasi kekuasaan ditampilkan secara publik. Namun, di balik itu terdapat panggung belakang yang terdiri dari kepentingan, strategi dan negosiasi yang tidak selalu tampak. Dengan demikian beragam caption berupa humor, simbol atau gaya bahasa yang digunakan dalam unggahan Instagram @wargapati_ dapat berfungsi sebagai “isyarat” yang mengungkap realitas di balik panggung, sekaligus menjadi strategi untuk menjaga citra kekuasaan sang penguasa. Pada dasarnya, wacana kebijakan memang bersifat performatif, karena bukan hanya menyampaikan inti pesan, tetapi dapat menciptakan realitas sosial baru.

Merujuk pada unggahan kebijakan di Instagram bapak Bupati Sudewo dapat dianggap berhasil (*felicitous*) bila ia mampu mengikat masyarakat sebagai agen yang patuh atau bahkan gagal (*infelicitous*) bila tidak menimbulkan legitimasi. Dengan

demikian, performativitas kebijakan disini bukan hanya sekedar komunikasi, melainkan tindakan yang membentuk relasi kuasa itu sendiri. Dalam konteks kebijakan Pemerintahan Kabupaten Pati di Instagram, masyarakat sebagai aktor sering kali direduksi pada peran sosial tertentu, misalnya mereka hanya menjadi penerima manfaat atau pendukung kebijakan. Namun, mereka juga ternyata memiliki potensi untuk menegosiasikan peran, bahkan menampilkan resistensi, sehingga relasi kuasa tidak pernah sepenuhnya stabil. Dengan demikian, dalam konteks demokrasi lokal, komunikasi suatu kebijakan melalui Instagram dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk menulis kehidupan dan suara mereka sendiri. Oleh karena itu, relasi kuasa tidak hanya ditentukan oleh pihak penguasa yaitu Bupati, tetapi juga oleh aktor-aktor warga yang menegaskan haknya untuk berpartisipasi, mengomentari atau bahkan mengkritisi suatu kebijakan.

Artikulasi Perebutan Ruang Publik

Sub bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan mengenai wacana Gerakan sosial Masyarakat pati dalam akun Instagram @wargapati_ dalam menindaklanjuti kebijakan dan gaya kepemimpinan Bupati Kabupaten Pati yaitu Bapak H. Sudewo, S.T., M.T. Wacana Gerakan sosial ini berusaha membangun identitas Masyarakat Pati dengan cara memisahkan mereka dari status quo. Gerakan sosial masyarakat Pati, yang terepresentasi melalui akun Instagram @wargapati_ menunjukkan bagaimana ruang publik virtual menjadi arena artikulasi politik warga. Unggahan, caption dan komentar yang berjumlah ratusan tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana mobilisasi massa dan pembentukan identitas kolektif. Hal ini sejalan dengan pandangan Fairclough bahwa kekuasaan berakar dalam bahasa dan konstruksi identitas, sehingga wacana digital dapat menjadi instrumen untuk menantang dominasi dan mengungkap ketidaksetaraan. Analisis wacana kritis terhadap konten @wargapati_ dengan memperlihatkan tiga dimensi utama yaitu :

1. Tekstual ada dalam penggunaan kosakata seperti "*ketidakadilan*", "*perlawanan*", dan "*gotong royong*" yang menegaskan narasi resistensi.
2. Praktik diskursif ada dalam interaksi antara unggahan dan ribuan komentar memperlihatkan proses produksi dan konsumsi wacana yang memperkuat solidaritas.
3. Praktik sosial ada dalam konteks kebijakan fiskal yaitu kenaikan PBB 250% dan relasi kuasa lokal menjadi latar yang menjelaskan mengapa wacana digital berkembang menjadi aksi kolektif secara luring.

Dengan demikian, akun @wargapati_ tidak sekedar menjadi kanal komunikasi, tetapi juga ruang publik alternatif yang memungkinkan warga menegosiasikan posisi mereka terhadap negara. Artikulasi ini memperlihatkan bahwa media sosial berfungsi sebagai arena perebutan ruang publik, di mana bahasa, simbol dan interaksi digital menjadi legitimasi politik dari gerakan sosial akar rumput. Gerakan sosial ini berusaha menciptakan identifikasi dengan keyakinan, nilai, cerita serta teks-teks yang dianggap sebuah kebenaran serta norma budaya yang ada. Hal tersebut dapat dicapai melalui

serangkaian artikulasi. Artikulasi dapat membuat suatu hubungan dengan cara membangun asosiasi atau membangun hubungan antara berbagai hal dan peristiwa yang berbeda serta gerakan sosial yang berbeda, ide yang berbeda dan orang yang berbeda. Hubungan yang mendalam dan mendasar ini berasal dari hasil dari kontestasi dan perjuangan politik seperti yang terlampir pada gambar berikut



Gambar 1. Aksi Perlawanan Masyarakat Pati Terhadap Pemerintah Pati dalam Kegiatan Penertiban Posko Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (Sumber : Akun Instagram @wargapati_)

a. Analisis Tekstual

Analisis ini fokus pada struktur bahasa yang digunakan dalam caption, hashtag dan visual konten dalam akun Instagram @wargapati_ dalam salah satu cuplikan video pada tanggal 5 Agustus 2025, yang menampilkan sekilas amarah Masyarakat Pati saat penertiban *Posko Aliansi Masyarakat Pati Bersatu* seperti gambar terlampir di atas. Dalam unggahan tersebut akun @wargapati_ sepertinya mengutip dari berita Detik Jateng Pada Selasa, 5 Agustus 2025 pukul 13.30 WIB dengan menampilkan narasi dengan judul “*Ricuh! Satpol PP Pati Bubarkan Penggalangan Donasi Demo Tolak Kenaikan PBB*”. Dalam kalimat tersebut terdapat frasa “*ricuh*” sebagai awalan atau pembuka untuk membangun kesan konflik dan ketegangan. Hal tersebut merupakan bagian dari strategi *framing* yang dilakukan media untuk menarik perhatian dan membentuk beragam opini publik. Perspektif *framing* tersebut berasal dari pendekatan konstruktivis terhadap gerakan sosial yang dilakukan oleh Masyarakat Pati. Selanjutnya, terdapat kalimat seperti “*membubarkan posko*”, “*adu mulut*”, “*massa kesal*”, “*menduduki truk*” hal tersebut telah menggiring publik dengan mengandung muatan emosional dan menunjukkan wujud resistensi salah satu warga Pati terhadap tindakan aparat Satpol PP. Kalimat-kalimat tersebut mengandung muatan emosional yang kuat dan membentuk citra warga Pati sebagai pihak yang aktif melawan ketidakadilan. Pilihan bahasa ini, tentunya tidak sekadar menggambarkan peristiwa, tetapi juga mengartikulasikan resistensi terhadap tindakan aparat Satpol PP.

Ungkapan Supriyono selaku Koordinator Aksi semakin menegaskan bahwa gerakan ini bukan hanya reaksi spontan, melainkan bentuk konsolidasi politik warga akar rumput. Dari perspektif teori ruang publik, bahasa yang digunakan dalam aksi dan liputan media tersebut berfungsi sebagai medium artikulasi kepentingan warga. Ruang publik di sini tidak hanya fisik yaitu jalan, posko dan truk yang diduduki, tetapi juga simbolik melalui wacana yang beredar di media sosial dan pemberitaan. Dengan demikian, resistensi warga Pati dapat dipahami sebagai upaya memperluas ruang publik agar suara mereka terdengar dan diakui dalam arena politik. Artikulasi ini telah menunjukkan bahwa bahasa dan simbol aksi telah menjadi sarana negosiasi kuasa antara masyarakat dan negara, sekaligus memperlihatkan bagaimana ruang publik bertransformasi menjadi arena perebutan legitimasi. Berikut ungkapan kutipan Supriyono selaku Koordinator Aksi menyatakan bahwa

"Donasi air mineral dari masyarakat Kabupaten Pati dan kami memprotes tindakan tersebut, karena kita sudah memberikan surat pemberitahuan aksi penggalangan donasi untuk aksi 13 Agustus 2025, suratnya sudah kami kirim ke pak Kapolresta dan kirim ke Bupati" Ungkapan Supriyono kepada para wartawan yang meliput.

Penjelasan Supriyono atau Botok tersebut lebih menekankan pada unsur "legitimasi aksi warga" serta menunjukkan bahwa aksi penggalangan donasi aksi 13 Agustus 2025 telah mengikuti prosedur formal seperti mengirimkan surat pemberitahuan (permohonan), sehingga jika secara pihak dilakukan pembubaran dianggap tidak sah bagi warga Pati. Hal tersebut menunjukan bahwa terjadi perebutan arena ruang publik. Para aksi demonstran warga pati telah mengubah ruang publik bukan hanya soal adaptasi, tetapi mengenai bagaimana mereka membentuk ulang tatanan sosial dan spasial. Jalanan publik serta bangunan Gedung sektor pemerintahan, pedagang dan kios-kios telah menjadi lebih dari sekadar ruang komersial, namun berfungsi sebagai ruang sosialisasi, tempat warga Pati membangun jaringan simbolis dan material yang memperkuat modal sosial dan spasial mereka. Namun, kehadiran ini sering dituduh melampaui "*ambang batas visibilitas yang benar*", sehingga memicu stereotip dan bahkan "kepanikan moral" yang diperkuat oleh media dan kebijakan lokal.

Aksi penggalangan donasi untuk kegiatan 13 Agustus 2025 yang merujuk pada penjelasan Supriyono atau Botok menekankan bahwa aksi warga tersebut telah mengikuti prosedur formal dengan mengirimkan surat pemberitahuan resmi. Dengan demikian, jika aksi tersebut dibubarkan secara sepihak, maka pembubaran dianggap tidak sah oleh warga dan memang praktik ini sering dipandang sebagai ancaman oleh otoritas lokal. Wilayah alun-alun atau ruang publik yang digunakan untuk penggalangan donasi menjadi arena perebutan legitimasi. Warga seringkali menegaskan hak mereka atas ruang publik melalui prosedur formal, sementara otoritas di lain pihak berusaha membatasi atau mengendalikan penggunaan ruang tersebut. Dengan demikian, ruang publik bukan hanya sekadar lokasi fisik, melainkan arena simbolik di mana legitimasi, kuasa dan hak kewargaan dipertarungkan.

Selain itu, dalam cuplikan video tersebut tersemat tulisan “momen pati terkeren bulan ini” yang menunjukkan bahwa warga atau pembuat konten telah berusaha menggeser narasi dari “konflik” menjadi “kebanggaan kolektif” warga Pati dalam mengupayakan kebenaran dan melawan ketidakadilan. Hal ini merupakan bentuk *reframing* wacana, yang mana suatu aksi dianggap mengganggu oleh otoritas penguasa justru dapat diposisikan sebagai wujud kebebasan berekspresi, keberanian dan solidaritas antar warga Pati. Selanjutnya, visualisasi video yang berdurasi 2 menit 32 detik telah menunjukkan cuplikan terkini aksi heroik dengan memperlihatkan ketegangan antara warga dan aparat Satpol PP. Lalu, tagar seperti: #wargapati #pati berusaha untuk membangun “identitas kolektif” dan memperluas jaringan koneksi serta jangkauan wacana ke komunitas digital yang lebih luas.

b. Analisis Praktik Diskursif

Dalam tahapan analisis ini, menjabarkan hasil dari analisis proses produksi teks yang mana merupakan salah satu ranah dalam praktik diskursus. Peneliti berusaha melihat konsumsi teks dalam sebuah hasil Like/Love/Suka sebanyak 52.900 akun dan kolom komentar berjumlah 2.419 komentar dan sudah di tonton sebanyak 784.000 kali, di repost sebanyak 912 kali dan dibagikan sebanyak 1.751 kali. Ikon tanda love atau suka dan komentar serta lainnya tersebut telah menunjukkan tingkat resonansi dan partisipasi digital yang tinggi bagi para warga digital atau sering di kenal sebagai netizen. Interaksi tersebut bukan hanya wujud konsumsi teks secara pasif, akan tetapi menjadi sebuah praktik sosial, di mana para pengguna turut serta dalam membentuk makna dan memperluas wacana yang dibangun oleh sang kreator. Komentar-komentar yang terjalin dalam konten tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses intertekstualitas atau memiliki keterkaitan dengan teks-teks sebelumnya. Salah satu komentar dalam konten reels tersebut yaitu

“ *Pati wajib dijadikan contoh pergerakan... salut sama Pati 🙏*”.

Komentar tersebut menunjukkan bahwa warga digital memberikan pengakuan kolektif terhadap aksi *heroic* tersebut sebagai bentuk partisipasi warga. Terdapat legitimasi terhadap aksi lokal Kabupaten Pati sebagai contoh atau *role model* aksi nasional atau aksi-aksi di daerah lainnya. Dengan nada komentar tersebut, telah memunculkan sebuah wacana resistensi atau pemberdayaan yang diakui oleh publik atau khalayak, sebagai *counter publik*. Komentar-komentar yang muncul dalam konten Instagram @wargapati_ tidak dapat dipisahkan dari proses intertekstualitas, karena selalu berhubungan dengan teks-teks sebelumnya dan membentuk makna baru. Komentar ini bukan sekadar ekspresi spontan, melainkan bentuk partisipasi warga digital yang memberikan legitimasi terhadap aksi lokal sebagai *role model* bagi gerakan sosial di tingkat nasional maupun daerah lain.

Dari perspektif teori *counter public* (Fraser, 1990; Dahlgren, 2005), praktik partisipasi digital seperti ini dapat dipahami sebagai pembentukan ruang tandingan (*alternative public sphere*) yang menantang dominasi wacana resmi negara. Media

sosial menyediakan arena di mana, warga dapat memproduksi narasi resistensi, memperluas solidaritas dan mengartikulasikan identitas politik yang berbeda dari representasi pemerintah. Komentar-komentar yang mengandung dukungan, pengakuan dan ajakan aksi memperlihatkan bagaimana publik digital tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi menjadi aktor aktif dalam membangun wacana tandingan. Dengan demikian, partisipasi digital melalui komentar dan interaksi di Instagram berfungsi sebagai praktik *counter public*. Hal tersebut karena dapat membuka ruang politik baru yang lebih inklusif serta memungkinkan warga marjinal untuk menyuarakan aspirasi dan memperkuat legitimasi gerakan sosial akar rumput. Dalam konteks wilayah Pati, ruang publik digital ini menjadi arena penting untuk mengartikulasikan resistensi terhadap kebijakan sepihak.

c. Analisis Situasional dan Institusional

Poin ketiga, sekaligus hal terakhir yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah dimensi sosiokultural atau praktik sosiokultural. Analisis ini di dapatkan di luar media itu sendiri dan biasanya sangat berpengaruh pada proses pembentukan wacana sehingga dapat muncul dalam sebuah media. Tahapan ini mengkaji bagaimana kondisi sosial, budaya dan institusional di luar media memengaruhi terbentuknya wacana dalam konten digital yang dibagikan atau di *upload*. Dalam konteks visualisasi konten tersebut, aksi salah satu warga Pati yang mencoba menghadang tindakan penertiban dari Satpol PP Kabupaten Pati merupakan wujud praktik sosiokultural dan menjadi fondasi penting yang membentuk narasi, simbol serta respons publik. Aksi yang dilakukan tersebut merupakan ajang sebuah ekspresi identitas lokal dalam Gerakan akar rumput yang mencoba mempertahankan segala keperluan logistik untuk mensukseskan aksi protes pada tanggal 13 Agustus 2025. Wacana tersebut tidak lahir dari ruang kosong atau hampa, akan tetapi dari sejarah panjang akibat pengabaian terhadap suara rakyat kecil, terutama dalam isu-isu pembangunan, pajak dan pengelolaan sumber daya di wilayah Pati. Dengan adanya media sosial Instagram tersebut, telah menjadi arena baru bagi warga untuk merebut sebuah representasi serta membangun narasi tandingan atau wacana kontra-hegemonik dan memperluas solidaritas di berbagai lintas wilayah. Wacana Gerakan sosial Masyarakat pati tersebut bukan hanya respon reaktif masyarakat terhadap kebijakan, akan tetapi menjadi wujud proaktif Masyarakat Pati dalam membangun identitas dan klaim politik sesuai dengan landasan keadilan dan kesejahteraan.

Selanjutnya, terdapat surat edaran pemberitahuan terkait Pembatalan kenaikan PBB Pati yang dikeluarkan pada tanggal 9 Agustus 2025 kepada para Camat se-Kabupaten Pati, tetapi tetap tidak menyurutkan antusias warga Pati untuk tidak berhenti dalam melakukan Gerakan Sosial Masyarakat Pati pada tanggal 13 Agustus 2025. Gerakan sosial pada tanggal 13 Agustus 2025 ini menjadi suatu simbol perlawanan terhadap arogansi kekuasaan dan juga sebuah keinginan untuk memperlihatkan bahwa legitimasi pihak pemerintah sedang digugat atau terjadi arah perlawanan dengan membentuk narasi alternatif. Salah satu konten yang menampilkan tragedi 13 Agustus 2025 di Pati seperti gambar berikut



Gambar 2. Persiapan Aksi Gerakan Sosial Masyarakat Pati dengan menyediakan sebuah keranda jenazah (Sumber : Akun Instagram @wargapati)

a. Analisis Tekstual

Tahapan analisis teks ini tertuju pada caption yang menyebutkan “Aksi Usung Keranda di depan kantor bupati, bentuk protes warga pati (12/08/25) “. Teks tersebut menunjukkan bahwa secara eksplisit mengidentifikasi sebuah aksi warga sebagai bentuk protes, bukan sekadar peristiwa atau suatu kerumunan semata. Hal tersebut menandakan bahwa Gerakan sosial Masyarakat Pati diposisikan sebagai aktor sosial yang sadar dan terorganisir dalam menyuarakan segala aspirasinya terhadap Pemerintah Kabupaten Pati. Kata “keranda” menjadi sebuah simbol duka atau kematian dan wacana perlawanan yang bertujuan untuk memperkuat makna resistensi. Simbol keranda dengan tulisan “Sudewo” yang di balik menjadi “Owedus” dan hal itu menjadi sebuah plesetan atau satir para warga Pati untuk mendekonstruksi identitas figur Bupati Pati dengan cara mengaburkan identitas asli pada simbol otoritas melalui humor dan ironi. Kata “owedus” merujuk secara fonetik menyerupai “wedus” atau dalam artian hewan kambing dalam Bahasa Jawa, dalam konteks lokal Masyarakat Jawa kata “wedus” sering disematkan atau memiliki makna seperti ejekan atau sebuah degradasi status. Kata satir tersebut telah menunjukkan bagaimana Gerakan sosial warga Pati menggunakan Bahasa sebagai alat resistensi dan menggeser citra pemimpin Bupati Sudewo dari posisi yang berkuasa menjadi bahan objek kritik. Selanjutnya, replika keranda dimaknai sebagai wujud kematian kepercayaan publik terhadap Masyarakat dan juga sebagai penanda matinya keadilan. Dalam replika keranda tersebut menampilkan tulisan “Pemerang Rakyat Owedus Selamat Tinggal” . Kalimat yang menyatakan “pemerang rakyat” telah dianggap Masyarakat Pati sebagai sebuah kewajaran yang tersemat pada diri Bupati Sudewo karena kebijakannya telah

mengeksploitasi rakyat dengan cara menetapkan kebijakan yang tidak berpihak. Label “pemeras rakyat” tersebut menjadi sebuah strategi artikulasi Gerakan sosial Masyarakat Pati untuk membingkai sosok actor dominan tersebut sebagai pelaku ketidakadilan. Lalu kalimat “selamat tinggal” menjadi sebuah harapan Gerakan sosial Pati untuk menyiratkan kematian kekuasaan politik Bupati Sudewo dalam memimpin wilayah Kabupaten Pati.

b. Analisis Praktik Diskursif

Tahapan analisis ini mencoba menganalisis wacana yang diproduksi, disebarkan dan dikonsumsi oleh khalayak. Salah satu proses produksi konten ini dibuat oleh akun @wargapati_ yang menunjukkan bahwa wacana berasal dari gerakan akar rumput dan bukan sebuah institusi formal para elit, Wacana konten tersebut lalu disebarkan atau didistribusikan melalui unggahan Reels Instagram sehingga memicu reaksi warga digital atau netizen melalui fitur like, komentar, sebarkan, repost dan tagar yang tersemat seperti #demo #pati #wargapati #pativiral yang digunakan sebagai ajang memperluas jangkauan konten supaya viral. Lalu, pada tahapan konsumsi terlihat dalam respon netizen dengan melakukan komentar seperti

“Semangat dulur, Bismillah Rakyat Menang 🙏”

Kalimat tersebut menjadi simbol dukungan emosional, doa dan harapan perubahan yang memperkuat solidaritas digital bagi Masyarakat yang tidak dapat menyaksikan atau ikut serta secara langsung. Terdapat interdiskursivitas antara wacana aktivisme, religiusitas dalam salah satu bahasa agama yaitu

“Bismillah” dan gaya komunikasi digital berupa emoji api/🔥

Kosa kata yang menjelaskan simbol membara dan semangat yang tidak padam. Ungkapan komentar tersebut terjalin pada aspek intertekstualitas dengan narasi sebelumnya mengenai ketidakadilan pajak dan arogansi sikap Bupati Sudewo. Selain itu, kantor bupati dan alun-alun kota menjadi materialitas utama yang menjadi ruang fisik yang sudah lama dikenal warga sebagai pusat pemerintahan sekaligus simbol kekuasaan. Ketika warga memilih wilayah alun-alun dan kantor bupati sebagai lokasi aksi, mereka para warga pati sedang memanfaatkan keakraban ruang tersebut untuk menegaskan bahwa protes mereka sah dan berakar pada ruang publik yang menjadi milik bersama. Simbol keranda yang diusung para warga Pati juga telah menunjukkan kekuatan materialitas aksi berupa benda fisik yang membawa makna emosional tentang duka dan kematian kepercayaan publik.

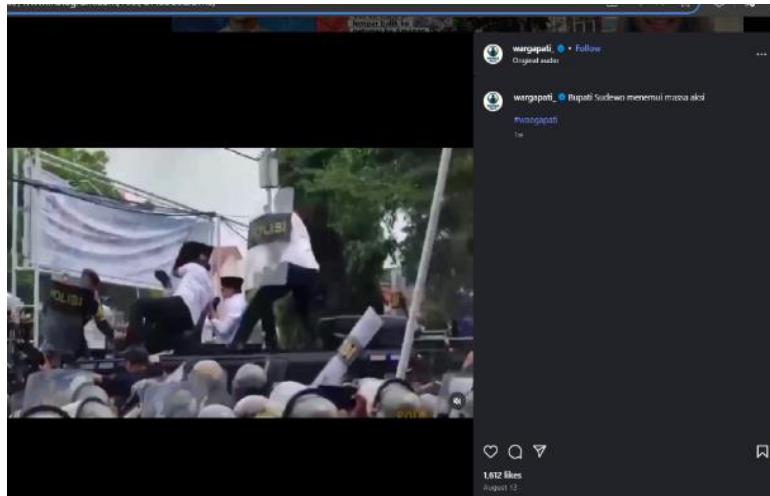
Dengan demikian, demonstrasi aksi Pati adalah pertunjukan sosial dan politik di panggung depan ruang publik. Aksi usung keranda dengan kata-kata satir seperti “Owedus” dan slogan “pemeras rakyat” adalah bentuk performativitas warga yang menantang norma dominan. Para warga Pati telah menampilkan diri sebagai aktor sosial yang sadar, terorganisir dan berani menggeser citra penguasa. Sama halnya

seperti bendera atau monumen yang menjadi simbol negara, benda berupa keranda dan satir Bahasa ini telah menjadi simbol tandingan yang menandai resistensi terhadap otoritas elit penguasa. Oleh karena itu, terjadinya wacana keterikatan tempat yang menekankan bagaimana memori kolektif melekat pada ruang itu sendiri. Aksi Demonstrasi 13 Agustus 2025 di Pati menjadi bagian dari memori politik lokal sebagai sebuah peristiwa yang dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap eksploitatif. Replika keranda membuktikan bahwa dengan tulisan “Pemerias Rakyat Owedus Selamat Tinggal” bukan hanya ekspresi saat itu, tetapi juga konstruksi memori yang akan terus hidup hingga kini dalam wacana publik.

c. Analisis Situasional dan Institusional

Pada tahapan ini terjadi praktik sosial berupa analisis situasional dan institusional yang perlu menggali konteks sosial-politik yang melatarbelakangi wacana dalam konten tersebut. Gerakan sosial Masyarakat Pati yang mengusung replika keranda meskipun surat edaran pembatalan kenaikan PBB sudah disebar, warga Pati tetap turun ke jalan dengan beragam simbol-simbol dan hal tersebut menunjukkan sisi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Kabupaten Pati. Gerakan sosial tersebut menjadi ajang krisis kepercayaan dan krisis representasi, di mana Masyarakat Pati merasa tidak diwakili oleh pemimpin daerahnya. Secara situasional penyebaran konten tersebut menjadi ajang demokratisasi digital dan mobilisasi kolektif yang melampaui ruang fisik dengan cara memperluas pengaruhnya melalui media sosial khususnya Instagram. Dalam konteks institusional, video konten berdurasi 26 detik bukan hanya sekadar dokumentasi dari persiapan aksi, akan tetapi menjadi ajang praktik wacana yang begitu kompleks yaitu menggabungkan beragam simbol visual, wacana resistensi dan dukungan public dalam suatu ruang digital. Dengan demikian, ruang digital berupa media sosial menjadi sebuah arena tontonan dalam memproduksi makna solidaritas serta tuntutan perubahan.

Gerakan sosial Masyarakat Pati yang terjadi pada tanggal 13 Agustus 2025 dibentuk berdasarkan perasaan "kita" yang sama dan sesama serta umumnya didasari oleh kekhawatiran untuk tidak menjadi "mereka" yaitu “para elit arogan”. Tampilan gambar berupa tragedi gerakan sosial Masyarakat Pati pada 13 Agustus 2025 terlampir sebagai berikut



Gambar 3. Bupati Sudewo Menemui Massa Gerakan Sosial Masyarakat Pati (Sumber : Akun Instagram @wargapati_)

a. Analisis Tekstual

Tahapan analisis teks ini tertuju pada *caption* yang menyebutkan bahwa “Bupati Sudewo menemui massa aksi”, kalimat tersebut berbentuk kalimat deklaratif informatif yang mana menyampaikan fakta bahwa seorang pejabat publik yaitu Bupati Sudewo melakukan tindakan langsung dengan cara menemui massa aksi. Kata kerja “menemui” ini memiliki konotasi aktif dan responsif yang ditujukan pada figur pemimpin Bupati Sudewo bahwa dirinya tidak menghindari, melainkan ia hadir secara fisik dalam ruang atau arena konflik sosial. Selanjutnya, penyebutan nama lengkap “Bupati Sudewo” dimaknai sebagai penanda relasi kuasa dengan mempertegas identitas kekuasaan dan tanggung jawab secara institusional. Lalu, frasa “massa aksi” menunjukkan pada warga Pati yang melakukan protes dan secara implisit telah menandakan adanya ketegangan atau konflik berupa tuntutan yang sedang berlangsung. Selain itu, dalam cuplikan video yang hanya berdurasi kurang dari 10 detik terdengar ucapan Bupati Sudewo menyatakan bahwa “saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya mohon maaf saya akan berbuat yang lebih baik lagi, terimakasih”. Dalam kalimat tersebut terdapat frasa pengulangan yang tersemat pada kalimat

“saya mohon maaf”.

Hal tersebut telah menunjukkan bahwa intensitas emosional dan usaha Bupati Sudewo dengan memberikan Kesan penyesalan. Wujud penekanan retorik ini dapat di analisis sebagai upaya strategi Bupati Sudewo untuk menunjukkan kesungguhan serta meredam kemarahan massa. Selain itu, frasa “Yang sebesar-besarnya” menjadi bentuk “hiperbola” yang memperluas skala permintaan maaf dengan menandakan bahwa kesalahan yang diakui Bupati Sudewo dianggap berat atau berdampak luas bagi Masyarakat Pati. Lalu, frasa “Saya akan berbuat yang lebih baik lagi” merupakan wujud komitmen masa depan yang di ungkapkan Bupati Sudewo yang secara tekstual

memiliki fungsi sebagai janji perbaikan kesalahan dan pemulihan legitimasi kekuasaan. Terakhir yaitu frasa

“Terima kasih”

Kosa kata tersebut menjadi simbol kalimat penutup yang menunjukkan upaya menjaga etika komunikasi relasi kuasa, kendatipun dalam konteks yang sangat tegang dan situasi yang memanas. Dalam video tersebut nada serta durasi ungkapan Bupati Sudewo memiliki beragam kemungkinan yang menunjukkan bahwa sikap ketergesaan Bupati Sudewo akibat tekanan situasi yang mencekam. Selain itu, pesan singkat yang diungkapkan Bupati Sudewo sebagai wujud kehati-hatian dalam menyampaikan pesan agar tidak menjadi boomerang kembali. Selain itu, kecepatan menyampaikan pesan tersebut menjadi ajang strategi komunikasi krisis dengan cara menyampaikan inti pesan secara to the point tanpa membuka ruang dialog lebih lanjut dengan massa aksi.

b. Analisis Praktik Diskursif

Tahapan analisis ini mencoba menganalisis wacana yang diproduksi, disebarkan dan dikonsumsi oleh khalayak. Dalam tahapan produksi wacana yang diupload oleh akun Instagram @wargapati_ telah menampilkan Bupati Sudewo dalam menyampaikan permintaan maaf melalui pengeras suara di tengah ketegangan massa aksi. Wacana ini diproduksi dalam situasi krisis, di mana terjadi demonstrasi skala besar yang menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan kenaikan PBB sebesar 250%. Pada siang hari di tengah terik matahari, akhirnya Bupati Sudewo muncul secara langsung sembari menyampaikan satu kalimat singkat sebelum terjadi pelemparan massa menggunakan sandal dan botol kepada pihak aparat yang memakai tameng. Ucapan formal dan singkat Bupati Sudewo ini telah menunjukkan upaya strategi guna meredakan ketegangan, akan tetapi patut disayangkan karena durasi yang sangat terbatas dan tidak adanya dialog, sehingga telah memperlihatkan bahwa wacana ini bersifat top-down dan simbolik sehingga tidak adanya wujud partisipatif bagi para aksi Masyarakat Pati.

Selanjutnya, terkait distribusi atau penyebaran wacana melalui platform utama media sosial Instagram akun @wargapati_ menjadi salah satu kanal utama penyebaran. Video tersebut cepat sehingga menjadi viral karena berdurasi pendek, visual dramatis dengan mengacu pada konteks emosional yang kuat. Wacana dalam konten video tersebut tersebar melalui repost, komentar, dan narasi tambahan dari akun-akun aktivis dan media lokal yang ikut menyoroti dan menyampaikan situasi terkisi pada 13 Agustus 2025. Pendistribusian wacana ini telah memperkuat framing bahwa permintaan maaf dianggap tidak cukup atau bahkan terlambat bagi Masyarakat Pati. Selain itu, video tersebut terjadi intertekstualitas dengan wacana yang bersinggungan dengan narasi lain seperti tuntutan mundur, solidaritas warga dan kritik terhadap kebijakan fiskal. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa ucapan dari Bupati Sudewo tidak berdiri sendiri sebagai entitas tunggal, melainkan menjadi bagian dari jaringan wacana yang lebih luas.

Lalu, tahapan konsumsi yang mana dalam video tersebut langsung disambut dengan berbagai respon publik baik secara langsung berupa aksi “pelemparan botol dan sandal “ oleh massa yang hadir secara luring. Hal tersebut telah menunjukkan gerakan penolakan terhadap isi dan bentuk wacana tersebut yang di ungkapkan Bupati Sudewo. Selain itu, dalam respon digital banyak komentar yang menyatakan bahwa permintaan maaf tersebut tidak tulus atau tidak menyentuh akar masalah yang sedang di perjuangkan. Konsumsi wacana ini bersifat resistif yang menghadirkan transformasi wacana berupa wacana permintaan maaf yang secara tekstual bersifat rekonsiliatif, namun justru dimaknai sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab oleh sebagian publik dalam arena digital. Hal tersebut menunjukkan bukti bahwa adanya negosiasi makna dalam praktik diskursif yang berlangsung pada Aksi Demo Pati 13 Agustus 2025.

c. Analisis Situasional dan Institusional

Pada tahapan ini terjadi praktik sosial berupa analisis situasional dan institusional yang perlu menggali konteks sosial-politik yang melatarbelakangi wacana dalam konten tindakan permintaan maaf Bupati Sudewo. Situasi sosial yang melatarbelakangi hal tersebut yaitu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% di Kabupaten Pati menjadi titik puncak amarah ketidakpuasaan Masyarakat Pati. Kebijakan tersebut menjadi sebuah wujud ketidakadilan dan dianggap tidak transparan serta tidak berpihak pada kondisi ekonomi masyarakat pasca-pandemi dan krisis pangan yang sedang berlangsung. Dengan berlangsung aksi massa 13 Agustus 2025 telah mendorong pembentukan ribuan warga yang tergabung dan ikut serta dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dalam melakukan demonstrasi besar-besaran di Alun-alun Pati. Gerakan sosial ini bukan mempermasalahkan perihal bisang ekonomi semata, tetapi menjadi ajang eksistensi dan ekspresi kemarahan terhadap ketimpangan representasi dan lemahnya komunikasi public yang terjalin dalam performativitas relasi kuasa antara Pemerintahan Kabupaten Pati dengan Masyarakat Pati.

Situasi saat penyampaian permohonan maaf dari Bupati Sudewo yang muncul di tengah massa dengan pengeras suara secara singkat, justru menimbulkan respons warga Pati berupa aksi pelemparan botol dan sandal yang menunjukkan bahwa secara situasional, wacana tersebut tidak diterima sebagai bentuk rekonsiliasi dan aksi perdamaian bahkan penyelesaian masalah. Selanjutnya dalam konteks institusional telah terjadi relasi kekuasaan dan legitimasi antara pemerintah Kabupaten Pati dengan Masyarakat Pati seperti penjelasan berikut bahwa posisi Bupati merujuk kepada kepala daerah, yaitu Bapak Sudewo yang mewakili institusi pemerintah lokal yang sedang mengalami krisis legitimasi. Dengan memberikan ucapan “saya mohon maaf... saya akan berbuat yang lebih baik lagi ..” menjadi ajang wujud performatif untuk mempertahankan otoritas di tengah delegitimasi public dan ketidakpercayaan publik. Dalam konteks institusi, pihak Kabupaten Pati dianggap tidak responsif terhadap aspirasi warga, terutama dalam suatu kebijakan fiskal. Selain itu, pihak seperti aparat keamanan yang terlibat secara langsung dalam pengamanan aksi, bahkan meredam

para demonstran dengan gas air mata dan semakin memperkuat citra represif sebuah institusional.

Dengan menganalisis ketiga konten dalam akun Instagram @wargapati_ telah menunjukkan bahwa wacana gerakan sosial Masyarakat Pati tidak dapat dan tidak ingin hidup dalam ruang hampa. Artikulasi Gerakan sosial Masyarakat Pati telah menciptakan parameter dan identitas kelompok dengan menetapkan siapa mereka dan siapa yang bukan, apa yang mereka yakini dan apa yang mereka hindari. Wacana gerakan sosial ini telah menyatukan para warga sebagai anggota di bawah identitas bersama dengan menciptakan makna baru untuk suatu Lokasi dan konstruksi sebagai sarana untuk mendapatkan penghargaan material dan atau simbolis yang sesaat melekat pada wacana tersebut. Selain itu, praktik komunikasi politik tidak pernah netral, melainkan selalu beroperasi sebagai tindakan yang memproduksi dan mereproduksi relasi kekuasaan. Ucapan permintaan maaf pihak Bupati Sudewo yang secara tekstual hadir sebagai tindak tutur performatif, dapat dibaca sebagai upaya simbolik untuk meredakan konflik dan menegaskan kembali otoritasnya di hadapan massa. Namun, tindak tutur ini tidak berdiri sendiri karena wacana tersebut beroperasi dalam jaringan wacana yang lebih luas, di mana produksi, distribusi dan konsumsi pesan berlangsung dalam arena publik yang penuh resistensi. Ketika video permintaan maaf tersebut diunggah dan disebarluaskan melalui media sosial, wacana tersebut segera hadir menjadi bagian dari intertekstualitas wacana yang menyinggung tuntutan mundur, solidaritas warga dan kritik terhadap kebijakan fiskal. Maka, apa yang dimaksudkan sebagai strategi rekonsiliatif pihak Bupati, justru ditransformasikan oleh publik menjadi simbol penghindaran tanggung jawab, memperlihatkan bahwa performa kuasa tidak pernah sepenuhnya dapat dikendalikan oleh aktor dominan.

Aksi Demonstrasi ini telah menyingkap krisis legitimasi pemerintah lokal. Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 250% menjadi pemicu utama, namun yang lebih mendasar adalah ketidakpuasan terhadap pola komunikasi politik yang dianggap tidak transparan dan tidak partisipatif. Kehadiran pihak Bupati Sudewo di tengah massa dengan ucapan singkat melalui pengeras suara telah menunjukkan strategi komunikasi krisis yang bersifat otoritatif. Dalam perspektif Foucault, relasi kuasa selalu bersifat produktif sekaligus rapuh, karena ia bergantung pada penerimaan dan pengakuan dari pihak lain. Ketika penerimaan itu runtuh, maka performa kuasa kehilangan efektivitasnya dan justru memperlihatkan kerentanannya. Sehingga, demonstrasi Pati menjadi contoh empiris bagaimana relasi kuasa bersifat performatif, rapuh dan selalu dinegosiasikan. Kekuasaan tidak hadir sebagai entitas statis, melainkan sebagai praktik sosial yang terus dipertarungkan melalui simbol, bahasa dan tindakan di ruang publik. Permintaan maaf Bupati Sudewo, meskipun dimaksudkan sebagai strategi pemulihan legitimasi, justru semakin memperlihatkan keterbatasan performativitas kuasa ketika berhadapan dengan resistensi kolektif para warga. Aksi ini menegaskan bahwa, ruang publik bukan sekadar arena administratif, melainkan panggung sosial dan politik di mana otoritas dan warga saling berhadapan, bernegosiasi dan membentuk ulang makna kekuasaan itu sendiri.

SIMPULAN

Media Instagram tidak sekadar menjadi medium alat komunikasi, melainkan sebagai arena performativitas relasi kuasa yang memperlihatkan bagaimana otoritas Pemerintah dan warga saling berhadapan dalam produksi makna politik. Dalam kasus Gerakan Sosial Masyarakat Pati, pada akun komunitas seperti @wargapati_ berfungsi sebagai panggung digital, di mana bahasa, simbol dan interaksi publik dipertontonkan, dinegosiasikan dan diproduksi ulang. Setiap unggahan, caption, maupun komentar tidak hanya menyampaikan informasi faktual, tetapi mereka berperan sebagai tindakan politik yang menegaskan bahwa posisi warga terhadap kebijakan pemerintah memiliki kewenangan yang sama. Dengan demikian, relasi kuasa tidak lagi terbatas pada arena birokrasi formal atau ruang fisik demonstrasi, akan tetapi ruang publik dapat diperluas ke ruang publik virtual yang lebih cair, partisipatif dan sulit dikendalikan oleh otoritas. Limitasi penelitian ini terletak pada pengungkapan bahwa media sosial menghadirkan logika tandingan terhadap struktur kuasa negara. Instagram menjadi arena di mana warga dapat merebut wacana, membentuk identitas kolektif dan mengartikulasikan resistensi melalui simbol-simbol kreatif seperti keranda, satir bahasa, maupun narasi visual yang viral. Arena praktik di ruang digital telah menunjukkan bahwa kuasa bersifat rapuh dan performative, karena bergantung pada pengakuan publik dan ketika pengakuan itu runtuh, maka legitimasi otoritas terguncang. Analisis wacana kritis telah membantu memperlihatkan bahwa apa yang tampak sebagai komunikasi sederhana sesungguhnya mengandung dinamika ideologis yang kompleks, di mana warga tidak hanya menjadi penerima kebijakan, namun mereka menjadi aktor politik yang aktif dalam membentuk makna dan arah resistensi. Selanjutnya, artikel ini menegaskan bahwa arena digital adalah medan simbolik baru yang memperluas demokratisasi partisipasi sekaligus memperlihatkan kerentanan kuasa negara.

Kasus Patilah menjadi salah satu contoh konkret bagaimana warga menggunakan media sosial untuk menggeser relasi kuasa dari dominasi *top-down* menuju negosiasi horizontal yang lebih terbuka. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya relevan bagi kajian gerakan sosial lokal, tetapi juga bagi pemahaman sosiologis tentang bagaimana performativitas kuasa beroperasi di era digital. Kuasa tidak lagi sekadar dijalankan melalui kebijakan formal, melainkan dipertarungkan melalui bahasa, simbol dan interaksi di ruang publik virtual yang terus berkembang. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek kajian ke platform lain seperti TikTok atau Twitter, guna menangkap kompleksitas wacana lintas media dan pengaruh algoritma terhadap visibilitas gerakan sosial. Sementara itu, komunitas dan aktivis lokal perlu terus memanfaatkan media sosial sebagai ruang artikulasi yang inklusif dan reflektif, dengan memperkuat strategi visual dan naratif yang mampu menjangkau emosi dan kesadaran publik. Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga perlu membuka ruang dialog yang lebih partisipatif, serta mengakui media sosial sebagai cerminan aspirasi warga yang sah. Terakhir, bagi akademisi dan praktisi, penelitian ini dapat menjadi rujukan akan pentingnya pendekatan analisis wacana kritis dalam memahami relasi kuasa di era digital, serta perlunya pengembangan metodologi yang mampu menjembatani antara teori dan praktik secara transformatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adni, Adrianus. 2025. "Profil Bupati Pati Sudewo: Dikenal Tegas, Berani, Tak Gentar Hadapi Demo, Juga Kontroversial." <https://surabaya.tribunnews.com/2025/08/12/profil-bupati-pati-sudewo-dikenal-tegas-berani-tak-gentar-hadapi-demo-juga-kontroversial>.
- antaranews.com. 2025. "Profil Bupati Pati Sudewo di balik kontroversi kenaikan pajak 250%." <https://www.antaranews.com/berita/5020081/profil-bupati-pati-sudewo-di-balik-kontroversi-kenaikan-pajak-250>.
- Avelino, Flor. 2021. "Theories of Power and Social Change. Power Contestations and Their Implications for Research on Social Change and Innovation." *Journal of Political Power* 14(3):425–48. doi:10.1080/2158379X.2021.1875307.
- Candra, Redaksi DDTCNews, Sapto Andika. 2025. "Waduh! 70% Daerah Masih Sangat Bergantung pada Suntikan Duit Pusat." <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1810416/waduh-70-daerah-masih-sangat-bergantung-pada-suntikan-duit-pusat>.
- Darmawan, Imam. 2024. "Manfaat Pajak untuk Program Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat." <http://www.pajak.go.id/id/artikel/manfaat-pajak-untuk-program-pembangunan-dan-kesejahteraan-masyarakat>.
- Dibley, Thushara, and Michele Ford. 2019. *Activists in Transition: Progressive Politics in Democratic Indonesia*. Cornell University Press.
- Estherina, Ilona. 2025. "Dana ke Daerah Dipangkas Rp 269 Triliun, Pajak dan Retribusi Berisiko Naik | tempo.co." <https://www.tempo.co/ekonomi/dana-ke-daerah-dipangkas-rp-269-triliun-pajak-dan-retribusi-berisiko-naik-2060369>.
- Gazali, Effendi. 2014. "Learning by Clicking: An Experiment with Social Media Democracy in Indonesia." *International Communication Gazette* 76(4–5):425–39. doi:10.1177/1748048514524119.
- Hajer, Maarten, and Wytske Versteeg. 2005. "A Decade of Discourse Analysis of Environmental Politics: Achievements, Challenges, Perspectives." *Journal of Environmental Policy & Planning* 7(3):175–84. doi:10.1080/15239080500339646.
- Hick, Rod. 2022. "Austerity, Localism, and the Possibility of Politics: Explaining Variation in Three Local Social Security Schemes Between Elected Councils in England." *Sociological Research Online* 27(2):251–72. doi:10.1177/1360780421990668.

- Imami, Rizki. 2025. "Centang Biru Instagram: Cara Mendapatkan dan Syaratnya." <https://www.idntimes.com/tech/trend/centang-biru-instagram-cara-mendapatkan-dan-syaratnya-go25q3-00-7vt1s-jvjk8y>.
- Indirawati, Tri. 2025. "Hari-hari Gelap Menuju Reformasi 21 Mei 1998: Demonstrasi, Tragedi, dan Lengsernya Soeharto." <https://www.kompas.com/kalimantan-timur/read/2025/05/21/092338188/hari-hari-gelap-menuju-reformasi-21-mei-1998-demonstrasi>.
- Indriawati, Tri. 2025a. "Korlap Perkirakan Jumlah Massa Demo Pati Capai 100 Ribu Orang, Dua Kali Lipat Tantangan Bupati." <https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/08/13/095512388/korlap-perkirakan-jumlah-massa-demo-pati-capai-100-ribu-orang-dua>.
- Indriawati, Tri. 2025b. "Update Demo Pati Hari Ini, Massa Berdatangan Sejak Subuh, Tuntut Bupati Sudewo Lengser." <https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/08/13/091342688/update-demo-pati-hari-ini-massa-berdatangan-sejak-subuh-tuntut>.
- Lo Piccolo, Alessandra. 2025. "The Influence of Collective Action: A Relational Perspective on the Consequences of Social Movements and Grassroots Politics." *Sociology Compass* 19(3):e70052. doi:10.1111/soc4.70052.
- Maggara, Tomi Satria, Bella Kharisma Putri, Aldri Frinaldi, Asnil, and Nora Eka Putri. 2024. "ANALISIS KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DANA TRANSFER PUSAT DAN DAMPAKNYA PADA KEMANDIRIAN FISKAL." *Jurnal Manajemen Dinamis* 6(4). <https://journalversa.com/s/index.php/jmd/article/view/3211>.
- Means, Alexander J. 2022. "Foucault, Biopolitics, and the Critique of State Reason." *Educational Philosophy and Theory* 54(12):1968–69. doi:10.1080/00131857.2021.1871895.
- Purwanti, Teti. 2025. "Simak! Begini Manfaat Pajak PBB-2 Bagi Masyarakat dan Negara." <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240819110000-4-564339/simak-begini-manfaat-pajak-pbb-2-bagi-masyarakat-dan-negara>.
- Santosa, Bangun. 2025. "Sudewo di Ujung Tanduk? Demo 13 Agustus Tetap Digelar, Warga Pati Bersatu Minta Bupati Lengser." <https://www.suara.com/news/2025/08/11/053500/sudewo-di-ujung-tanduk-demo-13-agustus-tetap-digelar-warga-pati-bersatu-minta-bupati-lengser>.
- Simanjuntak, Dany Saputra, Surya Dua Artha. 2025. "Aroma Resentralisasi Fiskal di Balik Ingar-bingar Efisiensi Anggaran." <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250822/10/1904678/aroma-resentralisasi-fiskal-di-balik-ingar-bingar-efisiensi-anggaran>.

- Sujito, Arie. 2025. "Menggugat Resentralisasi dan Kegagalan Desentralisasi: Belajar dari Perlawanan Rakyat Pati." <https://www.lab45.id/detail/374/menggugat-resentralisasi-dan-kegagalan-desentralisasi-belajar-dari-perlawanan-rakyat-pati-nbsp>.
- Takagi, Kenshin. 2025. "Electoral Competitiveness and Candidates' Preferences on Tax Increase: Evidence from Japan." *Party Politics* 13540688251319516. doi:10.1177/13540688251319516.
- Yuliana, D., and E. Prasetyo. 2022. "Desentralisasi Fiskal Dan Tantangan Kemandirian Daerah: Studi Kasus Jawa Tengah." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Universitas Diponegoro* 12.
- Zhu, Qinfeng. 2017. "Citizen-Driven International Networks and Globalization of Social Movements on Twitter." *Social Science Computer Review* 35(1):68–83. doi:10.1177/0894439315617263.